

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

RHADIF KHASYATULLAH
NPP. 31.0243

Program Studi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan
email : rhadifksy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, SE, MM

ABSTRACT

Background (GAP): *The management of Regional School Operational Assistance (BOSDA) funds at State Junior High Schools in the Muara Enim Regency Education and Culture Office, South Sumatra Province, encounters various challenges, including delays in fund disbursement, inadequate socialization and training for managers, and insufficient supervision and evaluation. **Objective:** This study aims to analyze the management of BOSDA funds at State Junior High Schools in Muara Enim Regency to identify existing obstacles and propose recommendations for improvement. **Method:** This research employs a qualitative method with a case study approach. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document studies. **Results/Findings:** The results indicate that despite some obstacles, BOSDA funds have been generally utilized to finance school operational activities, such as purchasing books and stationery, maintaining facilities and infrastructure, and paying honoraria to teachers and education personnel. However, the management still faces significant issues, including delays in disbursement, lack of training for managers, and inadequate supervision and evaluation. **Conclusion:** To enhance the accountability and effectiveness of the BOSDA program, it is essential to improve coordination between local governments and schools, increase the capacity of human resources, and strengthen the monitoring and evaluation system.*

Keywords: *BOSDA, State Junior High School, Fund Management*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): *Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola, serta minimnya pengawasan dan evaluasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana BOSDA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Muara Enim telah*

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti pembelian buku dan alat tulis kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta minimnya pengawasan dan evaluasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana BOSDA untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program.

Kata Kunci: BOSDA, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Pengelolaan Dana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM tersebut sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menimbulkan kurangnya kemampuan SDM, terutama di tengah perkembangan zaman seperti saat ini. Pendidikan merupakan wadah untuk memaksimalkan potensi SDM. Sebagaimana dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa", pemerintah perlu berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan nasional sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Yusri, 2019).

Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya agar pendidikan di Indonesia dilakukan secara merata di seluruh penjuru negeri. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan dana bantuan kepada sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti meneliti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sekolah menengah pertama negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim (Shelina et al., 2023).

Program dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) adalah salah satu bentuk realisasi pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang layak. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program yang telah dijalankan sejak tahun 2005 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam bentuk bantuan dana pendidikan yang diberikan sekolah di seluruh Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Dana BOSDA ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai dana pendamping dari dana BOS yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Madjid et al., 2021).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA), pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendanaan dengan anggaran yang besar setiap tahunnya dalam program bantuan dana BOSDA tersebut tentu tidak terlepas dari risiko adanya penyimpangan dalam pengelolaannya. Di Indonesia, maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat menjadi ancaman dalam penyaluran, pengelolaan, dan penggunaan dana bantuan pendidikan tersebut (Sakriaty et al., 2018).

Kabupaten Muara Enim, sebagai salah satu pusat pendidikan di wilayah Sumatera Selatan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di sekolah menengah pertama negeri. Dana BOSDA yang bersumber dari APBD diharapkan dapat digunakan secara efisien dan transparan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas sekolah, dan kondisi lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Pada praktiknya, pengelolaan Dana BOSDA di sekolah menengah pertama negeri seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan Dana BOSDA antara lain: sistem administrasi yang kompleks sehingga dalam penyalurannya mengalami keterlambatan proses pencairan dana hingga sampai ke sekolah yang berhak menerima, sistem penyaluran yang kurang transparan sehingga menimbulkan kecurigaan oleh berbagai pihak, serta prioritas penyaluran yang seharusnya menjadi aspek penting pemerintah daerah namun pada kenyataannya sering terabaikan sehingga sering terlambat dalam proses pendistribusiannya.

Perlu dilakukan analisis terhadap pengelolaan Dana BOSDA pada sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Muara Enim. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama negeri. Berdasarkan data yang ada, per siswa mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebanyak Rp15.000 secara keseluruhan. Sekolah menerima dana BOSDA dikalikan dengan jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut per semester. Sekolah yang menerima dana BOSDA paling banyak adalah SMPN 1 Gelumbang yaitu Rp136.260.000 karena memiliki jumlah siswa yang paling banyak di Kabupaten Muara Enim. Sebaliknya, sekolah yang menerima dana BOSDA paling sedikit adalah SMPN 4 Semende Darat Ulu yaitu Rp5.580.000 karena memiliki jumlah siswa yang paling sedikit di Kabupaten Muara Enim.

Dengan adanya analisis yang mendalam mengenai pengelolaan dana BOSDA ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar dana BOSDA dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan bangsa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meski program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Muara Enim telah berjalan, terdapat kesenjangan signifikan antara tujuan ideal dan realisasi di lapangan. Pertama, sistem administrasi yang kompleks sering kali menyebabkan keterlambatan pencairan dana hingga sekolah yang berhak menerima. Keterlambatan ini berdampak langsung pada keberlangsungan proses

belajar mengajar, di mana sekolah tidak dapat mengalokasikan dana sesuai kebutuhan secara tepat waktu. Padahal, ketersediaan dana yang tepat waktu sangat krusial untuk menunjang operasional dan kegiatan belajar mengajar.

Selanjutnya, kurangnya transparansi dalam sistem penyaluran dana BOSDA menjadi salah satu masalah utama yang seringkali menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak. Tanpa adanya transparansi, sulit bagi pihak sekolah, orang tua murid, dan masyarakat umum untuk memantau dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ketiadaan mekanisme transparansi yang memadai juga membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Prioritas penyaluran dana yang seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah juga sering kali terabaikan. Pada kenyataannya, proses pendistribusian dana sering kali terlambat, sehingga sekolah tidak dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini mengakibatkan banyak sekolah tidak dapat memaksimalkan dana BOSDA untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap pengelolaan dana BOSDA di sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Muara Enim. Dengan memahami akar permasalahan dan kesenjangan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSDA. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penyaluran dana BOSDA sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan banyak wawasan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan BOS pada berbagai tingkatan pendidikan di Indonesia. Salah satu studi penting dilakukan oleh Muhammad Elsa Tomisa Sutrisno pada tahun 2018 yang memfokuskan pada sistem akuntansi pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana serta perlunya pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa pencatatan akuntansi dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 dengan basis kas, sementara pada tahun 2015 telah beralih ke basis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 (Muhammad. Elsa Tomisa & Sutrisno, 2018).

Pangadilang N., Pangemanan S.E., dan Pangemanan F.N. dalam penelitian mereka pada tahun 2023 menyoroiti kebijakan pemerintah daerah dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud. Mereka menekankan perlunya peningkatan kinerja pengawasan oleh dinas pendidikan untuk memastikan transparansi data antara pihak sekolah dan dinas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan sinkronisasi data dapat

menyebabkan masalah dalam implementasi program BOS di tingkat daerah, sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan dan transparansi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Pangadilang et al., 2023).

Nugraha A., Hairani N.K., dan Prisila R. dalam penelitian mereka pada tahun 2023 mengevaluasi strategi pengelolaan dana BOS di SD PAB 14. Mereka menemukan bahwa ada tiga strategi utama dalam pengelolaan dana BOS, yaitu perencanaan yang disiapkan secara individu, pelaksanaan program yang sesuai dengan petunjuk teknis dan kebutuhan sekolah, serta proses pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara bertahap. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di sekolah (Nugraha et al., 2023).

Lopulalan J.E. dalam penelitian pada tahun 2020 di SD YPK EBENHAEZER Limalas, Kabupaten Raja Ampat, menyoroti pentingnya pelatihan bagi pengelola dana BOS untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif dan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah (Lopulalan, 2020).

Swandari S., Iskandar R., dan Effendi A.S. dalam penelitian mereka pada tahun 2020 di Samarinda, mengevaluasi implementasi program BOSNAS dan BOSDA di tingkat sekolah menengah atas. Mereka menemukan bahwa meskipun dana BOS telah dialokasikan sesuai dengan peraturan, masih ada sekitar 22% dana yang tidak dapat digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan peraturan, masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana agar lebih bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Swandari et al., 2020).

Barlian U.C., Erawan R.D.T., dan Yuniawati Y. dalam penelitian mereka pada tahun 2023 meneliti kebijakan BOPD di SMA Negeri 1 Purwakarta. Mereka menemukan bahwa penghentian pungutan iuran bulanan peserta didik berdampak pada pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah perlu menerapkan manajemen strategis yang tepat untuk memastikan bahwa standar nasional pendidikan tetap terpenuhi meskipun tanpa pungutan iuran bulanan (Barlian et al., 2023).

Daga T.K. dalam penelitiannya pada tahun 2022 di SDN Merjosari 1, Malang, menyoroti pentingnya penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dana BOS di SDN Merjosari 1 telah membantu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar (Daga, 2022).

Regina B. dalam penelitian pada tahun 2014 di Kota Malang, mengevaluasi implementasi kebijakan BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Penelitian ini menunjukkan adanya beberapa masalah seperti kurangnya dana BOS yang diterima sekolah, keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana, dan kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam pelaksanaan BOS dan transparansi informasi kepada masyarakat (Regina, 2014).

Rahmah A.T., Ratnaningsih S., dan Nurochim dalam penelitian mereka pada tahun 2023 di Raudhatul Athfal Nurul Huda, Bogor, menyoroti manajemen biaya operasional pendidikan pada tingkat PAUD. Mereka menemukan bahwa meskipun ada perencanaan dan alokasi dana yang baik, masih ada kebutuhan untuk menyesuaikan jumlah dana BOP dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang tepat dan alokasi dana yang efisien untuk mendukung pendidikan anak usia dini (Alifia Taufika Rahmah et al., 2023).

Pontoh J., Ilat V., dan Manossoh H. dalam penelitian mereka pada tahun 2017 di Kota Kotamobagu, mengevaluasi pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan dasar. Mereka menemukan bahwa kurangnya pengawasan, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dan manajemen yang baik untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan regulasi yang ada (Pontoh et al., 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Bengkalis menurut perspektif syariah. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan dana BOS secara umum, penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini mengungkap bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Kebaruan kedua dari penelitian ini adalah evaluasi spesifik terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan dana BOSDA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menyoroti transisi dari penggunaan basis kas ke basis akrual dalam pencatatan dana BOSDA, memberikan wawasan tentang dampak perubahan kebijakan ini terhadap pengelolaan dana dan efisiensi pelaporan keuangan di institusi pendidikan lokal. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi praktik pengelolaan dana di tingkat lokal.

Kebaruan ketiga dari penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan dana BOSDA. Dengan pendekatan ini, penelitian ini mampu menggali lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana BOSDA, serta bagaimana perspektif syariah dapat memperbaiki sistem yang ada. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, penelitian ini menambah literatur tentang strategi pengelolaan dana BOSDA yang efektif dengan menyoroti peran penting pengawasan dan pelatihan bagi pengelola dana. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada kebijakan yang jelas, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dan pelatihan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOSDA. Temuan

ini memberikan dasar bagi rekomendasi praktis untuk meningkatkan kapasitas pengelola dana melalui pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat.

Terakhir, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berperan lebih proaktif dalam memastikan pengelolaan dana BOSDA sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada teori dan praktik pengelolaan dana pendidikan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana BOSDA di masa depan.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam proses pengelolaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam pengelolaan dana BOSDA, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana tersebut di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari pengelolaan dana BOSDA terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Muara Enim. Dengan mengevaluasi hasil dari pengelolaan dana ini, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dana BOSDA dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, fasilitas sekolah, dan kesejahteraan siswa serta guru. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan pengelolaan dana BOSDA di masa depan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan di Kabupaten Muara Enim.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti menjadi instrumen utama dan teknik pengumpulan data bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengelolaan dana BOSDA di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Muara Enim. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi kepustakaan (Murdiyanto, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengidentifikasi karakteristik, sifat, atau fenomena suatu objek penelitian tanpa melakukan manipulasi variabel atau mencoba untuk menghubungkan sebab-akibat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelajahi berbagai aspek yang terlibat dalam pengelolaan dana

BOSDA, seperti kebijakan, proses pengalokasian dana, penggunaan dana, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Hal ini juga memungkinkan pemahaman perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim (Rijali, 2019).

Operasional konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori pengelolaan keuangan yang diuraikan oleh Kuswadi. Tahap-tahap pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Perencanaan mencakup merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang serta penyusunan anggaran keuangan. Pencatatan menuntut perekaman yang akurat terhadap pemasukan dan pengeluaran keuangan. Pelaporan melibatkan penilaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan keuangan teratur. Pengendalian mencakup pengendalian awal, pengendalian saat berjalan, dan umpan balik terhadap penggunaan keuangan (Hasibuan et al., 2022).

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi langsung di lapangan akan memberikan wawasan praktis tentang bagaimana dana BOSDA dikelola. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak kunci yang terlibat dalam pengelolaan dana BOSDA akan memberikan pemahaman tentang konteks dan dinamika pengelolaan dana tersebut. Dokumentasi akan mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku, laporan kegiatan, peraturan, foto, dan data relevan lainnya (Sari sasi gendro, 2022).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti memilih dan merangkum data yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, diagram, atau bagan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema dari data yang telah dianalisis. Metode analisis konten dan analisis naratif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan dana BOSDA berinteraksi dengan konteks sekolah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan (Thabroni, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sekolah menengah pertama negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim

Proses perencanaan pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Muara Enim dimulai dengan merumuskan anggaran tahunan dan jangka panjang. Setiap sekolah yang ingin menerima dana harus terdaftar dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengajukan jumlah siswa sebagai bagian dari usulan dana. Hal ini memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi syarat untuk menerima dana sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Langkah berikutnya adalah penyusunan anggaran dana BOSDA melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diajukan oleh masing-masing sekolah. RKAS ini diverifikasi oleh Tim BOSDA dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD). Pendekatan ini memastikan penggunaan dana BOSDA terencana dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dana BOSDA dialokasikan berdasarkan kebutuhan sekolah seperti pembelian buku

pelajaran, perbaikan fasilitas, atau pelatihan guru. Proses pengalokasian ini memastikan efisiensi penggunaan dana sesuai dengan prioritas pendidikan di tingkat daerah, yang ditegaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Penetapan alokasi dana BOSDA didasarkan pada jumlah siswa dan perhitungan alokasi bulanan yang telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati. Proses ini memastikan bahwa dana disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Implementasi mekanisme pengelolaan dana BOSDA mengacu pada pedoman BOS APBN yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan juknis yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Pelaporan keuangan dana BOSDA di Kabupaten Muara Enim mencapai tingkat ketransparan yang baik dengan melibatkan semua stakeholder termasuk komite sekolah dan masyarakat. Hal ini memastikan informasi terkait penggunaan dana dapat diakses secara mudah dan transparan, seperti yang dipraktikkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana BOSDA dilakukan secara terperinci di sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Muara Enim. Langkah-langkah ini mencakup rekaman alokasi dana, pengajuan proposal, evaluasi, penyaluran dana, pelaporan penggunaan, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penyaluran dana BOSDA dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk sekolah negeri, memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi kebutuhan mendesak yang melebihi pagu UP yang ditetapkan. Sekolah diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana BOSDA secara berkala, transparan, dan memenuhi syarat kelengkapan berkas yang ditetapkan dalam proses pertanggungjawaban dana. Partisipasi aktif komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOSDA menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, seperti yang diakui oleh Staf Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian, pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Muara Enim telah mengikuti prosedur yang ketat dan transparan, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pendidikan di tingkat daerah.

3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sekolah menengah pertama negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim

Faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOSDA adalah adanya ketransparansian yang ditingkatkan dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan memastikan transparansi yang tinggi, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dapat mempercayai program ini secara lebih baik. Kepercayaan ini pada akhirnya meningkatkan efektivitas program dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Selain itu, keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan dana BOSDA juga menjadi faktor penting. Kolaborasi yang baik dengan stakeholder memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi dalam pengelolaan dana BOSDA. Salah satunya adalah sistem pengalokasian dana yang kurang efektif karena proses yang panjang dan rumit. Meskipun dana sudah dialokasikan, proses administratif yang memakan waktu lama dapat menghambat penggunaannya secara efektif di sekolah-sekolah. Kendala lainnya adalah keterbatasan bantuan dari pemerintah untuk mendukung kinerja penerima bantuan, terutama di SMP Negeri Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah mungkin kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial dan sumber daya lainnya yang cukup dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di bidang pendidikan.

3.3 Dampak pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sekolah menengah pertama negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim

Pengelolaan dana BOSDA yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim memberikan dampak positif signifikan bagi SMP Negeri di daerah tersebut. Dana ini membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas yang masih kurang, meskipun belum sepenuhnya efektif. Dengan menggunakan dana BOSDA dengan baik, SMP Negeri dapat meningkatkan kualitas fasilitas mereka, yang secara langsung mendukung proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal bagi siswa, tetapi juga membantu dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Secara keseluruhan, pengelolaan dana BOSDA yang efisien oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Selain itu, dana BOSDA juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan SMP Negeri secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang baik, dana ini dapat digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang lebih nyaman bagi siswa di Kabupaten Muara Enim, serta meningkatkan reputasi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Kesejahteraan sekolah yang ditingkatkan melalui pengelolaan dana BOSDA mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur yang memadai hingga peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa dan tenaga pendidik, tetapi juga bagi seluruh komunitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama dari penelitian ini melibatkan mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sekolah menengah pertama negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Studi ini mengidentifikasi bahwa proses perencanaan dimulai dengan rumusan anggaran tahunan dan jangka panjang, serta persyaratan untuk terdaftar dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai langkah awal untuk menerima dana BOSDA. Penyusunan anggaran dilakukan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang diverifikasi oleh Tim BOSDA dan menjadi dasar untuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) di SKPD, memastikan penggunaan dana sesuai prioritas pendidikan.

Studi ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Muhammad Elsa Tomisa Sutrisno pada tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Bengkalis yang

menyoroti pentingnya transparansi dan penggunaan akuntansi yang sesuai. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi transisi dari basis kas ke basis akrual masih menjadi tantangan, sedangkan di Kabupaten Muara Enim, proses pengalokasian berdasarkan RKAS dan RKA memastikan kepatuhan terhadap pedoman BOS APBN yang telah disesuaikan.

Faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Muara Enim meliputi tingkat ketransparanan yang baik dalam pelaporan keuangan, melibatkan semua stakeholder seperti komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini konsisten dengan temuan Pangadilang N., Pangemanan S.E., dan Pangemanan F.N. (2023) mengenai pentingnya peningkatan pengawasan oleh dinas pendidikan untuk memastikan transparansi data antara sekolah dan dinas.

Namun, terdapat juga faktor penghambat seperti proses administratif yang rumit dalam pengalokasian dana yang dapat menghambat penggunaan dana secara efektif di sekolah-sekolah, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Nugraha A., Hairani N.K., dan Prisila R. (2023). Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perencanaan yang matang seperti yang diamati oleh Swandari S., Iskandar R., dan Effendi A.S. (2020), masih diperlukan upaya untuk memperbaiki efisiensi penggunaan dana agar lebih optimal.

Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Muara Enim telah memperlihatkan peningkatan dalam ketransparanan dan penggunaan dana sesuai dengan pedoman yang ada, meskipun masih ada tantangan dalam pengalokasian dan penggunaan yang efektif. Dengan mempertimbangkan temuan dari penelitian terdahulu, implementasi yang lebih baik dari pengawasan dan pengelolaan administratif dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOSDA di tingkat daerah.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Diskusi temuan menarik dari penelitian ini mengungkap beberapa aspek yang patut diperhatikan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Muara Enim. Salah satu temuan yang menarik adalah implementasi sistem pengalokasian dana berdasarkan RKAS dan RKA yang telah terintegrasikan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD). Hal ini tidak hanya memastikan transparansi dalam penggunaan dana, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas sekolah dalam memanfaatkan dana sesuai dengan prioritas pendidikan yang telah ditetapkan.

Selain itu, keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan dana BOSDA juga menjadi temuan yang penting. Praktik ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dengan stakeholder lokal, yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan program pendidikan di Kabupaten Muara Enim.

Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah kompleksitas administratif dalam proses pengalokasian dan pelaporan dana, seperti yang diungkapkan dalam temuan sebelumnya. Perbaikan dalam efisiensi administrasi dapat membantu mengatasi hambatan ini dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, temuan-temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan

praktisi pendidikan untuk terus memperbaiki mekanisme pengelolaan dana BOSDA demi mendukung tujuan pendidikan nasional.

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan dana BOSDA yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui APBD telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMP Negeri Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan teori pengelolaan keuangan, praktik perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dana BOSDA di sekolah-sekolah telah menunjukkan tingkat kecukupan yang memadai, memastikan penyaluran dana secara merata dan efisien untuk memperluas akses pendidikan di setiap sekolah.

Faktor pendukung seperti ketransparansian dalam pengelolaan dana dan kerja sama aktif dengan stakeholder telah berperan penting dalam kesuksesan program ini. Namun demikian, masih ada beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti sistem pengalokasian dana yang cenderung panjang dan terbatasnya anggaran yang dapat mempengaruhi kebutuhan operasional sekolah. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi serta peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah dapat memperbaiki situasi ini, memastikan dana BOSDA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat daerah.

Untuk itu, penelitian ini menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim lebih memprioritaskan kebutuhan utama SMP Negeri dalam penggunaan dana BOSDA. Pengalokasian dana sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang dapat memberikan dampak langsung pada proses pembelajaran dan kesejahteraan siswa, seperti perbaikan fasilitas sekolah, pengadaan peralatan pendidikan yang modern, serta pelatihan yang memperkuat kapasitas guru. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk dana BOSDA guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang masih dirasa kurang mencukupi di SMP Negeri Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi keterbatasan dalam akses data yang mendetail terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Muara Enim. Meskipun telah dilakukan wawancara dengan informan terkait dan studi dokumentasi yang komprehensif, terdapat kendala dalam mendapatkan data yang lebih mendalam terkait implementasi praktik pengelolaan dana BOSDA di setiap sekolah menengah pertama negeri. Selain itu, fokus penelitian yang terbatas pada aspek pengelolaan administrasi dan keuangan juga dapat membatasi pemahaman terhadap faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang mungkin mempengaruhi efektivitas program ini secara lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian, direkomendasikan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengintegrasikan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Studi lanjutan dapat melibatkan survei lebih luas

yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat lokal dan komite sekolah, untuk lebih memahami persepsi mereka terhadap efektivitas dan transparansi program ini. Selain itu, fokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari pengelolaan dana BOSDA terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan sekolah juga dapat menjadi pijakan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Taufika Rahmah, Sita Ratnaningsih, & Nurochmin. (2023). Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor Tahun Pelajaran 2022/2023. *TADBIR MUWAHHID*, 7(2). <https://doi.org/10.30997/jtm.v7i2.9711>
- Barlian, U. C., Erawan, R. D. T., Ardiana, L., & Yuniawati, Y. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 PURWAKARTA. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(8). <https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.744>
- Daga, T. K. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Merjosari 1 (STUDI di SDN Merjosari 1). *JURNAL ILMIAH ...*
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Lopulalan, J. E. (2020). ANALISIS PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SD YPK EBENHAEZER LIMALAS KABUPATEN RAJA AMPAT. *Jurnal Jendela Ilmu*, 1(1). <https://doi.org/10.34124/ji.v1i1.51>
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Wahyuni, N. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1989>
- Muhammad. Elsa Tomisa, & Sutrisno. (2018). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH. *Jurnal Sistem Akuntansi*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). STRATEGI PENGELOLA DANA BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS. *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 3(2). <https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>

- Pangadilang, N., Pangemanan, S. E., & Pangemanan, F. N. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP N 1 Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL GOVERNANCE*, 3(1).
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18266>
- Regina, B. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang). *None*, 3(1).
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sakriaty, Ridwan, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah. *E Jurnal Katalogis*, 6(2).
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Shelina, C., Sudiarti, S., & Kusmilawaty, K. (2023). Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Atas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Islam Manbaul Hidayah Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 2(02). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i02.272>
- Swandari, S., Iskandar, R., & Effendi, A. S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Samarinda Terhadap Kinerja Keuangan Sekolah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 5(3).
- Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.
- Yusri. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, 8(2).